

ERA BARU POLITIK ANAK MUDA DAN MAHASISWA UNTUK MENENTUKAN PEMIMPIN INDONESIA

Yusril Abdul Aziz¹, Eka Widya Ningrum²

¹Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Kota Madiun, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Kota Madiun, Indonesia

Email : azrilfhaigter@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran anak muda dan mahasiswa dalam pemilu 2024, anak muda dan mahasiswa memberikan dampak signifikan terhadap proses demokrasi di Indonesia, anak muda dan mahasiswa akan menjadi subjek politik yang menentukan masa depan Bangsa Indonesia apalagi Indonesia saat ini sedang menghadapi dua fenomena pergerakan global dan begitu penting untuk masa depan Indonesia, pertama yaitu bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif atau usia muda lebih banyak daripada usia yang sudah tua. Kedua masuk kedalam era revolusi industri 5.0. dalam upaya kelangsungan kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka kita harus menyiapkan generasi siap mengambil estafet kepemimpinan. Permasalahannya bagaimanakah membentuk pemimpin muda berkarakter dan peran serta seluruh anak muda berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024 untuk menentukan pemimpin yang pantas untuk Indonesia emas 2045. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis doktrinal yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan melalui Pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak muda dan mahasiswa memiliki peran yang sangat signifikan sehingga sekarang anak muda memang sudah harus berpartisipasi aktif entah itu sebagai seorang pemilih maupun sebagai seorang calon pemimpin.

Kata kunci : *Generasi, Demokrasi, Pemimpin*

Abstract

The aim of this research is to determine the role of young people and students in the 2024 elections, young people and students have a significant impact on the democratic process in Indonesia, young people and students will become political subjects who determine the future of the Indonesian nation, especially as Indonesia is currently facing two phenomena. global movement and very important for Indonesia's future, firstly, namely the demographic bonus where the number of people of productive age or young age is greater than the old age. Second, enter the era of industrial revolution 5.0. In an effort to continue life in society, nation and state, we must prepare a generation ready to take the leadership relay. The problem is how to form young leaders with character and the role of all young people actively participating in the 2024 elections to determine leaders who are worthy of a golden Indonesia in 2045. This research is descriptive doctrinal juridical research, with a qualitative approach. The method used is a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The results of this research show that young people and students have a very significant role so that now young people have to participate actively, whether as voters or as potential leaders.

Keywords: *Generation, Democracy, Leader*

A. PENDAHULUAN

Politik pada dasarnya merupakan sebuah fenomena yang berkaitan dengan orang-orang yang secara konsisten hidup dalam komunitas. Sesuai dengan kodrat nya manusia adalah makhluk sosial yang hidup secara berkembang dan dinamis. Karena itulah politik menjadi gejala yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangan. Karena manusia adalah inti utama dari politik, maka apapun alasannya pengamatan atau telaah politik tidak begitu saja meninggalkan faktor manusia.¹ Politik adalah proses dan aktivitas yang terkait dengan pengambilan keputusan dan pengaturan kekuasaan dalam suatu sistem sosial. Dalam konteks yang lebih luas, politik melibatkan interaksi antara individu, kelompok, dan lembaga-lembaga dalam masyarakat untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan bersama. Secara umum politik mencakup berbagai aspek, seperti pembentukan pemerintahan, pemilihan umum, legislasi, kebijakan publik, diplomasi, dan konflik kepentingan. Politik juga melibatkan perdebatan tentang nilai-nilai, ideologi, dan tujuan yang diinginkan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat.

Menurut Deliar Noer “politik adalah “segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat”. Melihat definisi ini, maka hakekat politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas, ataupun sikap, yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti kekuasaan bukanlah hakekat politik, meskipun harus diakui tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik memerlukannya agar suatu kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat. Politik sebagai kegiatan dikemukakan Miriam Budiardjo (1982: 8) sebagai berikut “pada umumnya dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu”. Dengan adanya definisi dari Deliar Noer maupun Miriam Budiardjo, pada prinsipnya mengandung persamaan, di mana kedua pakar ini melihat politik sebagai suatu kegiatan, namun ada perbedaan dalam hal bentuk kegiatan yang dilaksanakan. Lebih lanjut Deliar Noer mengemukakan bahwa konsep politik tidak saja dilihat dari sudut perilaku, tapi melihat aspek sejarah yakni melihat dari perspektif sejarah bangsa Indonesia sejak masa

¹ Abdulkadir B Nambo, Muhamad Rusdiyanto Pulufluwa, *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)*, Universitas Negeri Gorontalo, 2005, Hal 2-4.

sebelum kemerdekaan sampai sesudah kemerdekaan, di mana mempunyai konsep yang lebih luas.

Kesimpulan yang dikemukakan Deliar Noer bahwa politik tidak terbatas pada suatu kegiatan yang berkaitan dengan “*decision making*”(pengambilan keputusan) dan kebijaksanaan umum (*public politics*) seperti inti daripada konsep Miriam Budiardjo, akan tetapi mencakup tentang kegiatan-kegiatan yang bertujuan adanya perubahan-perubahan struktur masyarakat seperti adanya pergeseran kekuasaan politik dari penguasa atau rezim ke rezim lainnya. Jika persoalan ini dikaitkan dengan definisi yang dikutip dari Soltou, perbedaannya lebih jelas lagi, di mana politik terbatas pada penanganan masalah-masalah umum oleh negara dan untuk masyarakat. Politik dihubungkan dengan lembaga yang biasa disebut negara, maka konsep politik yang tersirat di dalamnya lebih sempit lagi. Berdasarkan definisi ini bahwa pengertian sistem politik sebagai hubungan manusia yang meliputi bentuk-bentuk kekuasaan, pengawasan, pengaruh, maka pengertian politik tidak lagi terbatas pada negara, tapi juga mencakup bentuk-bentuk persekutuan lainnya, seperti perkumpulan sosial, organisasi keagamaan, dan lain-lain. Pengertian yang melibatkan kelompok-kelompok sosial dapat membawa konflik, karena di dalam lembaga-lembaga tersebut ada pengambilan keputusan dan kebijaksanaan umum yang berlaku bagi seluruh kelompok atau warga. Namun hal tersebut tidak dapat ditafsirkan sama dengan keputusan dan kebijaksanaan yang diambil dalam organisasi lembaga yang biasa disebut negara.

Menuju Indonesia Emas 2045 adalah visi jangka panjang yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengubah Indonesia menjadi negara maju, berdaulat, mandiri, adil, dan berkeadilan pada tahun 2045, yang merupakan peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Visi ini mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan.² Untuk mencapai Indonesia Emas 2045 diperlukan upaya kolaboratif dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan tentunya generasi muda, termasuk mahasiswa. Maka Sudah menjadi kewajiban bagi suatu negara untuk melakukan pembangunan generasi mudanya sebagai aset masa depan. Pembangunan itu dapat berupa pembangunan gerakan pemuda, bukan hanya pada level nasional namun juga pada level internasional. Bagi Indonesia sendiri, gerakan tersebut memberikan implikasi semakin pentingnya posisi pemuda dalam konteks bonus demografi sebagai intellectual capital bagi bangsa yang besar.

² Rahul Gonzales, *Memaksimalkan potensi generasi muda di industri pertambangan untuk Meningkatkan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045*, Jurnal Himasapta, Vol 7, No 1, 2022, hal 39-40.

Bonus demografi merupakan kesempatan emas yang dapat dinikmati suatu negara, sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif rentang usia antara 15 - 40 tahun dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Bonus demografi merupakan masa transisi demografi, yaitu terjadinya penurunan tingkat kematian yang diikuti dengan penurunan tingkat kelahiran dan dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan penduduk usia produktif secara optimal.³ Dengan demikian, bonus demografi akan menjadi kesempatan besar, jika banyaknya penduduk usia produktif seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Bangsa Indonesia diperkirakan mengalami bonus demografi pada tahun 2012-2028. Hal tersebut menjelaskan bahwa Indonesia masih memiliki banyak waktu untuk menyiapkan penduduk usia produktif yang menjadi peran utama dalam pemanfaatan bonus demografi. Usia produktif tersebut berkisar 20-30 tahun, di usia tersebut mereka dapat menunjukkan jati dirinya di tingkat nasional.

Momentum Indonesia dalam memanfaatkan pemuda sebagai calon pemimpin bangsa adalah keniscayaan. Kesempatan tersebut dilakukan secara simultan oleh seluruh organisasi kepemudaan. Pola gerakan bersama yang dapat dilakukan yakni dalam meningkatkan kualitas pemuda melalui peningkatan pendidikan, ketrampilan dan kesehatan, serta kemampuan bangsa dalam menyiapkan lapangan pekerjaan bagi para tenaga kerja sesuai dengan kemampuan pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki, sehingga mereka mampu memperoleh pendapatan yang dapat menopang kehidupan diri sendiri dan keluarganya, terutama orang yang menjadi tanggung jawab mereka di usia non produktif. Jadi, untuk mendapatkan hasil pemanfaatan yang maksimal, tidak hanya diperlukan kerja keras oleh organisasi kepemudaan saja, melainkan seluruh komponen kehidupan. Selain itu kepemimpinan Indonesia 13 tahun mendatang sangat menentukan, kepemimpinan nasional di tahun 2024, 2029, dan 2034 sangat menentukan nasib Indonesia ke depan menuju negara maju, Indonesia memiliki potensi menjadi masuk kedalam jajaran 5 besar negara dengan ekonomi terkuat didunia namun tantangan yang ada tidaklah mudah, perlu keberanian seorang pemimpin dan strategi yang cerdas dari seorang pemimpin.

Bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin muda masa depan yang mampu memperkuat kebijakan perlindungan lingkungan dan mempromosikan pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Isu pendidikan dimana Pendidikan adalah kunci untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Pemimpin muda harus mampu memperkuat sistem pendidikan di Indonesia, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta

³ Syarifah Gustiawati Mukri, *menyongsong bonus demografi indonesia*, buletin hukum dan keadilan, vol 2, 2019, hal 3-5.

meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia Indonesia. Tantangan sosia dimana Indonesia masih menghadapi berbagai masalah sosial seperti diskriminasi, intoleransi, dan konflik. Pemimpin muda harus mampu memperkuat toleransi, mengedepankan keragaman, dan mempromosikan perdamaian di antara berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Tantangan politik yaitu Indonesia masih menghadapi masalah politik seperti korupsi, nepotisme, dan keterlibatan politik dalam kepentingan bisnis. Pemimpin muda harus mampu memperkuat sistem demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem politik di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pemimpin muda Indonesia masa depan harus mampu mengambil langkah-langkah konkret dan memperkuat kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Mereka harus mampu berinovasi, berpikir kreatif, dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan cara ini, pemimpin muda Indonesia masa depan dapat memimpin Indonesia menuju indonesia emas 2045. Untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 bukan hanya membutuhkan pemimpin muda tetapi juga partisipasi pemilih muda, dahulu pemilih muda jarang dirangkul terlebih untuk masuk secara aktif ke ranah kontestasi politik. Namun sekarang pemilih muda tidak buta politik. Mereka mengamati secara aktif politik praktis untuk menjadi dagar pengambilan sikap. Untuk itu, menelisik lebih lanjut kecenderungan perilaku politik dan partisipasi politik para pemilih muda menarik dilakukan termasuk didalamnya pandangan mereka tentang politik, pemilu, hoaks, dan politik uang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian tentang Era baru politik anak muda dan mahasiswa untuk menentukan pemimpin indonesia menetapkan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Mahasiswa Dalam Pemilu 2024 ?
2. Bagaimana Dampak Ketika Generasi Muda Turut Ikut Serta Dalam Kontentasi Politik ?

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan yang berhubungan dengan penelaahan hukum atas kaidah-kaidah yang sesuai dengan penelitian hukum tertulis. ⁴Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah melalui studi pustaka (*library research*) dengan metode pencatatan dan mengklasifikasikan jenis bahan hukum yang akan

⁴ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, hal. 2-3.

digunakan, seperti buku hukum, jurnal hukum, teori-teori hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait, dan membuat sistematika bahan hukum, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif yakni analisis yang bersifat deskriptif. Sifat deskriptif yaitu memecahkan masalah dengan cara pemaparan, mendeskripsikan dan memberikan gambaran masalah serta menyelesaikannya berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, sehingga dapat dipahami dengan mudah.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL

Peran Mahasiswa Dalam Pemilu 2024

Mahasiswa memiliki sikap kritis yaitu sebagai agen of changes dan agen of control social. Sebagai agen of changes mahasiswa masih dipercaya oleh masyarakat mampu membawa perubahan. Hal ini dikarenakan pergerakan mahasiswa masih diisi oleh nilai-nilai kaum muda yang identik dengan gerakan moral yang bertumpuh pada empati dan simpati terhadap lingkungannya, masyarakatnya, bangsanya, menumbuhkan semangat keberpihakan pada rakyat, serta menjadi jembatan bagi dunia akademik dan masyarakat. Gerakan mahasiswa merupakan gerakan murni kepedulian yang penuh dengan analisis intelektual untuk perubahan. Peran mahasiswa dalam pemilu 2024 sangat penting dan dapat memberikan dampak signifikan terhadap proses demokrasi yang ada di Indonesia, berikut adalah beberapa peran yang dapat dilakukan mahasiswa dalam pemilu 2024:

1) Pendidikan politik : Pendidikan politik merupakan suatu proses yang mengajarkan kepada warga Negara mengenai nilai-nilai, norma-norma, serta simbol-simbol politik melalui media berupa sekolah, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan partai politik. Selain itu pendidikan politik juga diperlukan untuk menunjukkan bagaimana cara berpolitik yang sehat dan bersaing secara sehat.⁵ Materi yang disampaikan dalam proses pendidikan politik kepada masyarakat meliputi posisi, hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan konstitusi Negara. Pentingnya pendidikan politik pada masa saat ini sangat menentukan tingginya tingkat kesadaran politik seseorang. Semakin awal seorang individu mendapat pembelajaran tentang politik maka semakin tinggi kesadaran untuk mau berpartisipasi langsung dan mampu untuk mengemban tanggung jawab sebagai warga Negara yang baik. Pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat terus

⁵ Adina Sukmawati dan Al Rafni, *Peran Organisasi Kepemudaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemuda di Kota Padang*, Journal of Civic Education, Vol 3, 2020.

meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Definisi pendidikan politik ini mengandung tiga unsur penting, yakni: pertama, adanya perbuatan memberikan latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia. Kedua, perbuatan dimaksud harus melalui proses dialogis yang harus dilakukan dengan suka rela antara pemberi dan penerima pesan secara rutin. Ketiga, perbuatan tersebut ditujukan untuk para penerima pesan dapat memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan politik. Kartono (1990) memberikan pendapatnya tentang hubungan antara pendidikan dengan politik yaitu pendidikan dilihat sebagai faktor politik dan kekuatan politik. Sebab, pendidikan dan mahasiswa pada hakekatnya juga merupakan pencerminan dari kekuatan-kekuatan sosial politik yang tengah berkuasa, dan merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada. 2) Edukasi Pemilih : pemahaman politik yang kuat dinilai bisa menjadi senjata melawan hoaks yang peredarannya tidak terbendung. Penguatan pengetahuan politik warga dibutuhkan agar kualitas demokrasi tidak tergerus dampak buruk hoaks, penguatan dan pemberdayaan pengetahuan politik warga negara melalui pendidikan politik yang berkelanjutan sangat penting.

Literasi politik mutlak dibutuhkan masyarakat untuk menghadapi isu hoaks yang merajalela. Masifnya hoaks saat ini terjadi karena begitu mudahnya informasi menyebar dengan luas dan tidak terlepas dari tingkat literasi publik yang rendah mengenai politik, hoaks merupakan persoalan kebudayaan yang perlu di atasi dengan jalur kebudayaan pula yakni literasi.⁶Regulasi pemerintah tidak akan cukup untuk membentengi masyarakat dari isu dan berita hoaks. Untuk itu maka perlu adanya edukasi dan sarana dari mahasiswa untuk membantu pemerintah dalam menyebarkan dan memberikan informasi kebenaran. Kondisi politik saat ini cenderung tidak tenang akibat terjadinya penyebaran informasi yang tidak benar di media sosial dan layanan percakapan pribadi yang sering dipahami bahwasannya berita itu adalah kebenaran tanpa adanya cross check terlebih dahulu hal ini diakibatkan minimalnya pemahaman tentang politik. literasi atau pemahaman politik sangat penting karena informasi yang benar itu sesungguhnya adalah faktor kunci politik yang beradap. Literasi atau Pemahaman tentang politik tidak hanya dimaknai secara sempit dalam ruang lingkup media sosial atau teks tetapi juga dalam konteks sosial politik untuk mewujudkan warga negara yang terdidik, pemahaman tentang politik bukan hanya mengetahui arti politik secara sederhana melainkan sikap dan pribadi yang mengedepankan edukasi politik untuk mewujudkan warga negara

⁶ Saleh Al Hamid, *Penguatan literasi politik masyarakat di desa huntu barat kabupaten bone bolango*, Jurnal pengabdian masyarakat, vol 2, no 1, 2023.

yang memiliki kesadaran kritis serta mendorong masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai dinamika politik.

Edukasi politik kepada masyarakat disadari betul konsep yang membutuhkan waktu, masyarakat membutuhkan pendampingan bagi penguatan kapasitas intelektual dalam politik berikut juga edukasi etika dalam berpolitik dan tentunya pendampingan ini menjadi tugas kita bersama bukan hanya tugas pemerintah semata tetapi juga seluruh lapisan khususnya mahasiswa untuk berperan aktif dalam memberikan edukasi politik demi kemajuan demokrasi. Dialektika bersama masyarakat tentang dasar mereka menentukan pilihan calon pemimpin harus terus tumbuh karena ini menjadi kebutuhan fundamental bagi kemajuan IQ politik masyarakat. Pemerintah dan lembaga pendukung lainnya harus bersinergi untuk memberikan edukasi politik yang berkelanjutan, pemerintah tidak boleh hanya sekedar menghabiskan anggaran melainkan merumuskan dan menjalankan program pendidikan politik yang berkualitas, berkelanjutan dan dapat dievaluasi. Mahasiswa dalam hal ini juga dapat membantu program yang sudah direncanakan sehingga mahasiswa berperan sebagai penghubung, pendukung, mobilisator dan sebagai penyebar informasi yang valid. Akhirnya meningkatkan pemahaman tentang politik kepada masyarakat.

3) Pengawasan Pemilu : Pemilu dilaksanakan sebagai bentuk dari demokrasi yang merupakan sarana menuangkan aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat dan memilih pejabat politik secara konstitusional.⁷ Dengan memandang pemilu adalah kesempatan bagi rakyat untuk menentukan dan memilih pejabat politik sesuai dengan pilihan mereka sendiri, maka diperlukan pengawasan untuk memastikan jalannya pemilu secara jujur dan adil. Pada saat sekarang yaitu era reformasi tuntutan untuk pemilu JURDIL semakin tinggi, dibuktikan semakin kuatnya legal formal pembentukan Bawaslu di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Bawaslu telah diperkuat menjadi lembaga yang mandiri bukan lagi menjadi lembaga sub ordinat dari KPU, kedudukan Bawaslu menjadi sejajar dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Dalam meningkatkan kualitas demokrasi, pengawasan pemilu penting dilakukan seluruh lembaga yang dibentuk melalui konstitusi dan Undang – Undang bahkan masyarakat serta generasi muda dan mahasiswa perlu mengambil bagian dalam upaya ini. Hal ini perlu dilakukan untuk mewujudkan pesta demokrasi berjalan dengan bersih, jujur, dan adil. Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis maka perlu adanya sebuah inovasi dan strategi dalam pengawasan pada setiap penyelenggara pemilu. Mahasiswa dalam hal ini dapat bertindak untuk mewujudkan pemilu yang demokratis misalnya, bekerja untuk

⁷ Agam Primadi, David Efendi, Sahirin, *Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif*, *Journal of Political Issues*, vol 1, 2019.

hak asasi manusia, pendidikan dan mobilisasi pemilu, penyebaran berita dan data yang benar tentang partai atau calon pemimpin, riwayat atau cacatan penting partai dan calon pemimpin, pengungkapan praktek praktek korupsi dan penyalahgunaan lainnya. Mahasiswa dapat memulai dengan inovasi pengawasan partisipasi aktif dalam pemilu dan politik untuk dapat melakukan pengawasan termasuk melaporkan kepada panwaslu berbagai macam pelanggaran tahapan pemilu. Pengawasan pemilu sebagai sebuah mekanisme yaitu melihat, mencermati, memperoleh laporan atau bukti yang menjadi indikasi awal adanya dugaan pelanggaran pemilu. Mahasiswa dapat membentuk forum warga di dalam sosialisasi pemilu yang berkualitas baik untuk pencegahan maupun upaya membentuk pemberdayaan dan pemahaman terhadap masyarakat. Mahasiswa dapat membantu pemerintah untuk meminimalisir pelanggaran – pelanggaran yang terjadi di dalam pemilu, mulai dari politik uang dan politik identitas.

Mahasiswa dapat memberikan edukasi bagi pemilih pemula sehingga para pemilih yang masih awal ini dapat memilih secara objektif berdasarkan data data dan fakta, calon pemimpin yang berkualitas bukan hanya ditentukan dari dirinya sendiri tetapi juga dari pemilih yang cerdas. Ketika pemilih sudah mendapat edukasi dan pemahaman yang baik tentang politik kedua adalah pentingnya kualitas penyelenggara pemilu. Selanjutnya Peluang yang mungkin terjadi di dalam proses pemilu ini perlu diantisipasi untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan berbasis kewarganegaraan. 4) Aktivisme politik : sejarah dinamika politik di indonesia mencatat berlangsungnya transisi kekuasaan dari negara otoriter berubah menjadi negara dengan sistem demokrasi sipil, transisi perubahan sistem politik ini menandakan berakhirnya kekuasaan Soeharto sebagai Presiden RI pada 21 mei 1998 yang memimpin indonesia lebih dari 32 tahun. Transisi kekuasaan tersebut juga berdampak pada perubahan politik secara dramatis di Indonesia, semua menjadi saksi masuknya situasi liberalisasi politik.⁸ Proses transisi menuju reformasi demi mewujudkan sistem politik yang lebih demokratis menyita banyak perhatian publik, baik dari kalangan intelektual dan masyarakat biasa, salah satu kelompok intelektual yang paling giat menyuarakan demokrasi adalah mahasiswa yang memiliki tanggung jawab yang tidak hanya lulus dari perguruan tinggi dan mendapatkan gelar sarjana tetapi juga ikut serta melibatkan diri dalam persoalan politik, sosial, kebudayaan, dan lingkungan masyarakatnya. Peranan mahasiswa dalam sejarah politik di indonesia sangat besar dan penting seperti aksi demokrasi dalam menurunkan Presiden Soeharto sebagai perjuangan mahasiswa dalam

⁸ Bayu Nurrohman, Yeby Ma'asan Mayrudin1, Dewi Sri Astuti, Renata Maharani, *Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten*, *Journal of Political Issues*, Vol 4, No 2, 2023, hal 137-151.

keikutsertaanya memperjuangkan Hak-Hak rakyat Indonesia. Mahasiswa melakukan gerakan sosialnya sebagai kontrol sosial dan moral, mahasiswa memiliki organisasi dan ikatan yang besar seluruh Indonesia memiliki masa potensial yang sewaktu waktu dapat digerakkan melakukan pressure maupun dukungan politik. Sudah banyak sekali aksi aksi dari mahasiswa yang melawan hal hal yang menindas rakyat indonesia, mahasiswa dianggap kaum yang kritis akan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sudah seharusnya mereka bersikap kritis untuk mengontrol jalannya politik di Indonesia.

Dampak Ketika Generasi Muda Turut Ikut Serta Dalam Kontestasi Politik.

Peranan generasi muda dalam keikutsertaan kontestasi politik sangat penting artinya pemuda sebagai lapisan masyarakat paling besar dan adanya potensi kreativitas generasi muda. Generasi muda akan melanjutkan tongkat estafet agar dapat melanjutkan perjuangan bangsa indonesia dan mampu menghadapi tantangan dan menjawab tantangan dimasa yang akan datang, sebagai generasi penerus terutama pelajar dan mahasiswa harus tangguh menghadapi tantangan yang akan datang demi mencapai tujuan dan cita cita bangsa dan negara dalam satu gerak langkah yang terarah, terpadu dan berkesinambungan. Partisipasi generasi muda dalam kontestasi politik memiliki dampak yang sangat signifikan, diantaranya :

1) Suara dan Perspektif Baru : Generasi muda membawa perspektif segar dan gagasan inovatif dalam politik. Partisipasi mereka membuka ruang untuk pendekatan baru dalam memecahkan masalah sosial dan politik yang dihadapi oleh masyarakat. Mereka membawa isu-isu penting seperti perubahan iklim, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia ke dalam agenda politik. 2) Perubahan Sosial, Partisipasi generasi muda dalam politik dapat memicu perubahan sosial yang positif. Mereka mendorong reformasi kebijakan, memperjuangkan hak-hak warga, dan memperhatikan isu-isu yang sering diabaikan oleh pemerintah. Dengan suara mereka yang kuat, generasi muda dapat mengubah paradigma dan menciptakan perubahan yang lebih inklusif dan adil. 3) Membangun Kesadaran Politik: Melalui partisipasi politik, generasi muda dapat membangun kesadaran politik dalam diri mereka sendiri dan orang lain. Mereka belajar tentang proses demokrasi, hak-hak mereka sebagai warga negara, dan pentingnya terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih terdidik dan berpartisipasi aktif. 4. Pemimpin Masa Depan : Generasi muda yang terlibat dalam kontestasi politik memiliki potensi untuk menjadi pemimpin masa depan. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang mereka peroleh, mereka dapat mempersiapkan diri untuk mengambil peran kepemimpinan dalam pemerintahan, partai politik, atau organisasi masyarakat.

Hal ini penting untuk memastikan kelangsungan demokrasi dan pembangunan yang berkelanjutan.

D. PENUTUP

Peran anak muda dan mahasiswa dalam pemilu 2024 sangat signifikan diantaranya adalah Partisipasi Aktif: pentingnya peran mahasiswa dalam berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan umum mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam mendorong partisipasi pemilih muda. Kedua adalah Edukasi Pemilih: peran mahasiswa dalam menyebarkan informasi yang objektif dan akurat tentang calon dan isu-isu politik yang relevan, ini juga merupakan upaya mahasiswa dalam meningkatkan literasi politik masyarakat. Ketiga Mobilisasi Pemilih: mahasiswa dapat berperan dalam menggalang kesadaran dan mobilisasi pemilih, baik melalui kampanye langsung, sosial media, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Keempat Pengawasan Pemilu: mahasiswa dalam melakukan pengawasan pemilu untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses pemilihan, sehingga ketika nanti terjadinya dugaan pelanggaran mahasiswa dapat melaporkan dan menangani pelanggaran pemilu yang terjadi. Aktivisme Politik: mahasiswa dapat menjadi agen perubahan melalui aktivisme politik, baik melalui aksi damai, kampanye advokasi, atau keikutsertaan dalam organisasi-organisasi politik. Maka melihat peranan anak muda dan mahasiswa yang begitu penting sudah saatnya anak muda melanjutkan estafet kepemimpinan indonesia, anak muda membawa suatu harapan baru, anak muda akan menjadi subjek politik yang diperhitungkan dan ini adalah era baru mulainya politik anak muda.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Agam Primadi, David Efendi, Sahirin, *Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif*, *Journal of Political Issues*, vol 1, 2019.
- Adina sukrawati dan Al Rafni, *Peran Organisasi Kepemudaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemuda di Kota Padang*, *Journal of Civic Education*, Vol 3, 2020.
- Bayu Nurrohman, Yeby Ma'asan Mayrudin1, Dewi Sri Astuti, Renata Maharani, *Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten*, *Journal of Political Issues*, Vol 4, No 2, 2023, hal 137-151.
- Rahul Gonzales, *Memaksimalkan potensi generasi muda di industri pertambangan untuk Meningkatkan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045*, *Jurnal Himasapta*, Vol 7, No 1, 2022, hal 39-40.
- Saleh Al Hamid, *Penguatan literasi politik masyarakat di desa huntu barat kabupaten bone bolango*, *Jurnal pengabdian masyarakat*, vol 2, no 1, 2023.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, hal. 2-3.
- Syarifah Gustiawati Mukri, *menyongsong bonus demografi indonesia*, *buletin hukum dan keadilan*, vol 2, 2019, hal 3-5.

Internet :

- Suara pemuda dalam pemilu 2024
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c29814geg2eo> (diakses pukul 22.40 WIB Tanggal 29 Oktober 2023)

